



POLICY BRIEF

# Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan



Disusun oleh :

Pengurus Forum BAPPEDA Kota Seluruh Indonesia (Forum BAKTI)



# Klaster Isu : Perencanaan dan Penganggaran

## 1

**Sering terlambatnya pedoman umum penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta tata kelola SIPD**

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Konsistensi manajemen waktu penerbitan kebijakan.
2. Penyediaan platform digital perencanaan nasional dan diskusi dengan perwakilan daerah.
3. Early drafting system.
4. Pengembangan portal berbasis AI untuk akses input kebijakan secara realtime
5. Evaluasi SIPD agar lebih responsive terhadap kebutuhan daerah

## 2

**Sinkronisasi Kemendagri dan Kemenpan RB dalam perencanaan.**

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kerjasama intensif antara Kemendagri dengan Kemenpan RB dalam cascading dan format RPJMD
2. Integrasi LPPD dengan SAKIP/LKIP menjadi 1 (satu) dokumen laporan

## 3

**Mandatory spending dan Dana Transfer**

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mandatory spending diarahkan pada kegiatan layanan dasar esensial.
2. Peninjauan kembali kebijakan mandatory spending pengawasan 0,75% dari APBD.
3. Transparansi dalam perencanaan dana transfer ke daerah
4. Pengaturan penggunaan dana transfer yang lebih fleksibel.

## 4

**Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD**

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Evaluasi IUP RPJPD untuk target-target yang sulit dicapai.
2. Kesepakatan dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengukuran indeks capaian IUP.

## 5

**Pokok-pokok pikiran DPRD dan kegiatan kunjungan kerja/kajian antar daerah DPRD.**

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Diperlukan revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menyesuaikan pengaturan POKIR DPRD.
2. Pengaturan kunjungan kerja DPRD
3. Diperlukan regulasi yang mewajibkan DPRD menyusun laporan kinerja tahunan kepada pemerintah.



# Klaster Isu : Tematik

**Belum tersedia petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG)**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Diperlukan kejelasan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG.
2. Diperlukan pedoman dan petunjuk teknis MBG sebagai payung hukum bagi daerah

**Banyaknya urusan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Evaluasi dan rasionalisasi urusan pemerintahan daerah agar lebih efisien.
2. Evaluasi urusan absolut pemerintahan di bidang agama.
3. Evaluasi pembagian urusan konkuren (bersama) pemerintahan, antara kewenangan pusat dan daerah.

**Sulitnya akses terhadap Hasil Sensus Regsosek (Register Sosial Ekonomi) di BAPPENAS**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kesepakatan bersama antara Kemendagri dengan BAPPENAS dan BPS dalam pemanfaatan data REGSOSEK.
2. Percepatan akses dan peningkatan kualitas data REGSOSEK

**Bertumpuknya awarding dan laporan dari kementerian/ lembaga**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Integrasi kompetisi/lomba dan awarding, dikelola oleh Kemendagri
2. Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan laporan sektoral
3. Penyederhanaan indikator kinerja dalam LPPD yang disesuaikan dengan IUP

**Eselonisasi di pemerintah daerah**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan eselonisasi Asisten Sekretariat Daerah, BAPPEDA atau sebutan lain dan Inspektorat Daerah menjadi Eselon 2A
2. Melakukan percepatan organisasi agile di OPD (fungsional)